









pat mewakili semua ulama di Jawa Timur, yang dalam hal ini ulama yang mengeluarkan fatwa hukum Islam. Memang tidak semua ulama dapat mengeluarkan fatwa hukum/berijtihad, karena hal tersebut harus memenuhi syarat-syarat menjadi ulama yang ijtihady, hanyalah mereka yang dapat menegakkan dalil atas hukum yang dikemukakan dan dapat membela dan mempertahankan pendapat-pendapatnya, menurut kaedah-kaedah yang sudah diakui para ulama mujtahidin.

Orang yang dipandang mujtahid, ialah orang yang melengkapi syarat-syaratnya, atau mempunyai alat-alat ijtihad yang lengkap. Maka alat-alat ijtihad atau syarat-syarat itu ialah :

1. Mengetahui segala ayat Al-qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan hukum.

Mengenai ayat, hendaklah para mujtahid itu mengetahui : Muthlaqnya, muqaiyadnya, mujmalnya, nasikhnya, mansukhnya, 'aamnya dan mukhashishnya dan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-qur'an (Ash-Shiddiqy, 1980:110).

Mengenai hadits, haruslah ia dapat memisahkan antara hadits yang shahih dengan yang dala'if. Ia harus mengetahui dengan baik perawi-perawi hadits, sebab-sebab





















Kalau kita melihat pada fakta sejarah kelahirannya, maka Al-Irsyad selisih lebih akhir dari Muhammadiyah. Bersama-sama dengan perhimpunan Islam lainnya, Al-Irsyad ikut berkiprah untuk membina ummat Islam. Hubungan antara Al-Irsyad dengan Muhammadiyah sangat erat sekali, karenanya keduanya bersumber dari sejarah yang sama, yaitu sebagai gerakan pembaharuan Islam yang ekspansinya berbeda. Jika Al-Irsyad gerakannya ditujukan kepada bangsa Arab yang ada di Indonesia, sedangkan Muhammadiyah pergerakannya ditujukan kepada ummat Islam di Indonesia (wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 25 Juli 1995).

Ulama Al-Irsyad dan ulama Muhammadiyah dari segi korelasi antara keduanya (baca: tokoh) pendiri gerakan tersebut yaitu adanya suatu konsensus dalam usaha untuk menyebarkan ide-ide reformasi Islam. Kontak itu terutama sekali terjadi pada tahun 1912 masehi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan As-Syeikh Ahmad Mohammad Assor - katy Al-Anshori, dimana dengan perantaraan majalah Al - manar, mereka berdua (baca: tokoh) tersebut bertukar pikiran tentang perlunya didirikan suatu organisasi untuk mengembangkan ide-ide reformasi Islam (wawancara dengan Ust.H.Djadid Lahdji, 25 Juli 1995).

Tujuan dan usaha dari organisasi Al-Irsyad ini adalah terwujudnya manusia seutuhnya yang bertauhid dan bertaqwa kepada Allah SWT, bersih dari syirik, takhyul



dan ghurafat, berakhlak mulia, bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhai Allah SWT (PW.Al-Irsyad, tt: 4).

#### 4. Ulama Persis

Persatuan Islam (Persis) secara resmi berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, Jawa Barat. Sebelum Persis diproklamkan berdirinya telah terdengar juga semboyan dan kumandang suara hendak kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi semboyan itu tidak diikuti dengan pemberantasan bid'ah, taqlid dan syirik secara tegas dan nyata (PP.Persis, tt: 4).

Kaum Persatuan Islam tidak sependapat dengan golongan yang demikian itu. Malah Persis menentang faham dan pandangan yang keliru itu. Persis malah berpendapat sebaliknya, selama kaum muslimin belum kembali kepada pimpinan Al-qur'an dan As-Sunnah, selama itu pula kaum muslimin tidak mungkin menyusun persatuan yang hakiki, membina kekuatan dan kekuasaan (PP.Persis, tt: 4).

Idea pendirian organisasi ini berasal dari pertemuan yang bersifat kenduri yang diadakan secara berkala di rumah salah seorang anggota kelompok yang berasal dari Sumatera tetapi yang telah lama tinggal di Bandung (Noer, 1994:95-96).



Menurut Deliar Noer, bahwa topik masalah agama yang dibicarakan ketika itu bersumber dari majalah Al-Manar di Mesir, dan majalah Al-Munir di Padang. Pertikaian antara Al-Irsyad dan Jamiat Khair, isi pembicaraan yang disampaikan Fakhri Hasyim dari Surabaya yang datang ke Bandung dalam kunjungannya untuk keperluan dagang. Tambahan lagi masalah komunisme yang telah berhasil memecah sarakat Islam yang begitu kuat, bukan saja hal yang sangat menarik untuk dibicarakan, tetapi juga merupakan hal yang menyebabkan kalangan agama di Bandung resah. (Noer, 1994:96).

Dari hasil pembicaraan dan pertemuan itulah kemudian mereka menyepakati untuk mendirikan organisasi yang diberi nama Persatuan Islam (Persis). Memang perhatian Persis terutama ialah bagaimana menyebarkan cita-cita dan pemikirannya. Ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan umum, tabligh, khotbah-khotbah, kelompok-kelompok studi, mendirikan sekolah-sekolah dan menyebarkan atau menerbitkan pamflet-pamflet, majalah-majalah dan kitab-kitab. Penerbitannya ini yang terutama menyebabkan luasnya daerah penyebaran pemikirannya. (Noer, 1994:97).

Lagi pula penerbitan ini yang dijadikan referensi oleh guru-guru dan propagandis-propagandis organisasi lain seperti Al-Irsyad dan Muhammadiyah. Dalam hal ini Persis mendapat dukungan dan partisipasi dari dua





taqlid pada perseorangan atau pada madzhab tertentu, dan ada pula yang memakai jalan tengah dalam menghadapi suatu masalah dilihat langsung pada sumber aslinya yaitu Al-qur'an dan As-sunnah, jika di dalam kedua sumber tersebut diambil pendapat orang lain atau madzhab tertentu.

### 1. Muhammadiyah Dengan Majelis Tarjih

Masalah syariah dalam organisasi Muhammadiyah di kelola oleh sebuah majelis yang disebut dengan Majelis Tarjih. (Lubis, 1993:90). Kalau dilihat dari segi bentuk kata, maka Majelis Tarjih terdiri dari dua kata, yaitu Majelis dan Tarjih. Kata "Majelis" oleh Poerwadarminta diartikan dengan "dewan" (Poerwadarminta, 1989:545).

Tujuan utama majelis ini adalah untuk menghindarkan ummat Islam, anggota Muhammadiyah khususnya, dari perpecahan yang disebabkan perselisihan dalam masalah khilafiat. Menurut Arbiyah Lubis, bahwa objek penelitian Majelis Tarjih kelihatannya mencakup dua hal, yaitu masalah khilafiat yang hukumnya diperselisihkan oleh ulama-ulama madzhab, dan masalah-masalah yang belum ada hukumnya, yang merupakan persoalan yang baru muncul (Lubis, 1993:93).

Adapun metode dan sistem yang pakai ulama Muhammadiyah atau Majelis Tarjih di dalam memfatwakan sebuah hukum, adalah sebagai berikut :

Menurut ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa-Timur (KH.Mu'amal Hamidy) yang diwawancarai penulis pada tanggal 21 Juli 1995, bahwa kita harus mencari sumber dasar yang paling valid di dalam mengistimbatkan hukum yaitu Al-qur'an dan As-sunnah, setelah itu kita harus menilai dari keshahihan As-sunnah tersebut yang mau dijadikan sumber hukum, lalu di dalam menarjihkan masalah-masalah tersebut, tentunya Majelis Tarjih tidak mempunyai metode Tarjih yang tersendiri, tetapi kita harus mengacu pada kaedah Tarjih tahun 1928, yaitu hanya mengikuti kepada ushul fiqh yang dianggap kuat. Jadi, metode Tarjih disamakan dengan metode ijtihad dan Muhammadiyah dalam hal ini mengikut kepada salah satu metode yang telah di tempuh oleh mujtahid terdahulu.

Keputusan yang diambil oleh Majelis Tarjih tentang masalah-masalah khilafiat di atas tidak selamanya berada dalam lingkup madzhab yang empat. Dalil yang dipilih adalah yang dianggap lebih kuat dan lebih shahih. Dalil yang demikian kemungkinan ditemukan pada pendapat salah satu diantara imam madzhab yang empat (baca: Imam Syafii, Hanafi, Maliki, Hambali) dan bisa pula diluarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak terikat pada pendapat madzhab, meskipun mereka dalam mengukuhkan suatu pendapat bertolak dari pendapat madzhab, tetapi pendapat madzhab tidak harus diambil, jika mereka memandang dalil yang menunjang sesuatu madzhab tidak kuat untuk dijadikan alasan. (Wawancara dengan KH.Mu'amal Hamidy





## 2. Nahdlatul Ulama Dengan Syuriah

Syuriah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama (PB.NU, 1995:5), yang berfungsi secara kolektif sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijaksanaan Nahdlatul Ulama mempunyai tugas memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menurut faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah, baik dibidang aqidah, syariah maupun akhlaq/tasawuf (PB.NU, 1995:24).

Adapun metode yang dilakukan oleh ulama NU ialah apabila Syuriah NU menjumpai masalah yang berkaitan dengan hukum, maka pertama-tama NU merujuk pada kitab Al-qur'an dan Sunnah. Sejalan dengan sikap dasar keagamaan NU, apabila dalam Al-quran dan Sunnah belum ditemukan pemecahannya, maka NU mengambil jalan ijma' yang lebih mendekati diri pada madzhab Syafi'i (kitab karya Imam Syafi'i), sehingga hal ini biasa dikenal di lingkungan Nahdliyin dengan sebutan al-kutub al-muktabarah (kitab-kitab yang dapat dijadikan pegangan) atau al-kutub al-mautsuq biha (kitab-kitab yang dapat dipercaya) (wawancara dengan KH. Imron Hamzah, 25 Juli 1995).

Dalam kaitan dengan permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam al-kutub al-muktabarah, maka Syuriah NU melimpahkan masalah tersebut ke Lajnah Bachtsul Masail Diniyah, yang ber-







tersebut tidak mungkin dalam menghadapi persoalan baru hukum Islam, maka Al-Irsyad menggunakan ijtihad jama'iy yang mengacu pada kaidah ushul fiqh yang ada (baca: qiyas, masalah mursalah dll.). Oleh karena itu Al-Irsyad tidak berpegang pada salah satu madzhab tertentu (baca: Imam Syafii), tetapi selama merupakan dasar-dasar hukum oleh ulama terdahulu (baca: ulama salaf) yang lebih valid dan lebih mendekati diri pada Al-qur'an dan As-sunnah, maka hal tersebut dijadikan pedoman dalam beristimbath (wawancara dengan Ust. H. Djadid Lahdji, 28 Juli 1995).

#### 4. Persis Dengan Dewan Hisbah

Dewan Hisbah adalah suatu dewan yang membidangi dalam masalah-masalah hukum, yang mana Dewan Hisbah tersebut berkedudukan di Pimpinan Pusat Persis yaitu di Bandung (wawancara dengan Ust. Hud Abdullah Musa, 15 September 1995).

Dalam Qanun Asasi (Anggaran Dasar) Persis bab I pasal 2 menyebutkan bahwa, dasar dan tujuan Persis ialah berlakunya ajaran dan hukum Islam dalam segenap segi kehidupan manusia. Dan sumber hukum yang tertinggi dalam Persis ialah Al-qur'an dan Hadits shahih.

Persis di dalam mengeluarkan suatu pendapat tidak banyak berbeda dengan Muhammadiyah atau Al-Irsyad. Jadi Islam itu universal yang mencakup segala aspek



mendekati kesamaannya dengan metode yang dipakai Majelis Tarjih Muhammadiyah, hal ini karena dua organisasi besar Islam di dalam MUI mempunyai peranan yang sangat penting pengaruh dua organisasi ini sangat menentukan sekali kepada jalannya MUI (wawancara dengan Drs.H.Munawar Thohir 5 Agustus 1995).

Dilihat dari cara MUI dalam membahas masalah-masalah hukum, mereka pertama kali melihat langsung kepada sumber asasi yaitu Al-qur'an dan Hadits shahih semampu mungkin, jika masalah itu tidak diketemukan dalam dua sumber tersebut dengan intelektualitas yang tinggi, maka dicari di dalam ijma' (ijma' sahabat), pada hal ini metode yang dipakai oleh MUI, lebih mendekati pada metode yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Namun apabila di dalam Al-qur'an dan Hadits tidak diketahui (baca: diketemukan), maka MUI tidak berijtihad secara langsung sebagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah, melainkan mencari di dalam ijma' (ijma' sahabat), apabila tidak diketemukan di dalam ijma', lalu mencari dalam kutubul 'arba'ah, yaitu pendapat Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Apabila dari pendapat imam empat tersebut bertentangan antara satu dengan yang lainnya, jalan yang ditempuh oleh MUI ialah dengan cara

